

ANALISIS KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF GLOBAL, NASIONAL, DAN REGIONAL: TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP TREND KETIMPANGAN DAN PEMBANGUNAN

Ilham Kurniawan*, Mawar Agustin, Naila Naya Ummu Syahidah & Hilma Mutiara Winata

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: ilhamkurniawan123456777@email.com*

Riwayat Artikel

Diterima: 28 Oktober 2025
Disetujui: 28 November 2025
Diterbitkan: 12 Desember 2025

Abstract

This study analyzes poverty at the global, national, and regional levels by highlighting inequality in public services, regional development, and media perceptions. The revised US\$3 PPP global poverty line increases the number of people in extreme poverty and indicates that the world is not yet on track to achieve SDG 1. In Indonesia and West Java, poverty has decreased, but spatial disparities remain strong due to inequitable access to basic services. Sentiment analysis of 3,336 Detik.com news stories using SVM shows a predominance of negative-neutral sentiment on the issues of poverty, inequality, and public services, reflecting public criticism of policy effectiveness. The integration of quantitative and sentiment data shows that areas with high poverty are also most frequently reported negatively. The study concludes that poverty alleviation requires equitable distribution of basic services, inclusive regional development, and the use of sentiment analysis as a policy evaluation instrument.

Keywords: Poverty, Public Services, Regional Development, Regional Inequality, Sentiment Analysis.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kemiskinan pada level global, nasional, dan regional dengan menyoroti ketimpangan pelayanan publik, pembangunan wilayah, dan persepsi media. Revisi garis kemiskinan global US\$3 PPP meningkatkan jumlah penduduk miskin ekstrem dan menunjukkan dunia belum berada pada jalur SDG 1. Di Indonesia dan Jawa Barat, kemiskinan menurun tetapi kesenjangan spasial tetap kuat akibat ketidakmerataan pelayanan dasar. Analisis sentimen terhadap 3.336 berita Detik.com dengan SVM menunjukkan dominasi sentimen negatif-netral pada isu kemiskinan, ketimpangan, dan pelayanan publik, mencerminkan kritik publik terhadap efektivitas kebijakan. Integrasi data kuantitatif dan sentimen memperlihatkan bahwa wilayah dengan kemiskinan tinggi juga paling sering diberitakan secara negatif. Penelitian menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan pemerataan layanan dasar, pembangunan wilayah inklusif, dan pemanfaatan analisis sentimen sebagai instrumen evaluasi kebijakan.

Kata kunci: Analisis sentimen, Kemiskinan, Ketimpangan Wilayah, Layanan Publik, Pembangunan Regional.

A. PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan global tetap menjadi tantangan multidimensional yang terus berkembang seiring perubahan struktur sosial, dinamika populasi, serta kualitas layanan publik di berbagai negara. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan

pendapatan, tetapi juga sebagai bentuk eksklusi sosial yang tercermin dari terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan layak, dan kesempatan hidup yang lebih bermartabat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat kompleks dan berlapis; Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kemiskinan harus dipahami melalui pendekatan multidimensional berbasis layanan publik. Misalnya, OPHI (2020) menegaskan bahwa kemiskinan non-moneter semakin dominan di negara berkembang akibat ketimpangan akses layanan dasar, sementara Ferreira et al. (2021) menyoroti bahwa kualitas tata kelola publik dan pemerataan layanan menjadi faktor utama yang membentuk tingkat kerentanan sosial antarwilayah. menunjukkan bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi oleh ketimpangan akses layanan sosial antarwilayah.

Fenomena kemiskinan dewasa ini tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan minimnya pendapatan rumah tangga. Lebih jauh dari itu, kemiskinan berubah menjadi gambaran ketimpangan yang berlapis ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar, kesempatan sosial, hingga kualitas hidup yang seharusnya dapat dinikmati secara setara di berbagai wilayah. Patut dicatat bahwa dinamika global turut memperumit persoalan ini. Meskipun standar internasional dan agenda pembangunan seperti SDGs memberikan kerangka acuan universal, kenyataannya kondisi lapangan di berbagai negara termasuk Indonesia menunjukkan variasi yang tidak selalu sejalan dengan target global tersebut. Menariknya, perbedaan ini bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga soal bagaimana masyarakat memaknai kemiskinan melalui opini kolektif dan persepsi publik yang terbentuk dari pemberitaan media.

Dalam konteks Indonesia, persoalan kemiskinan jelas tidak terdistribusi secara merata. Bahkan, jika ditelusuri lebih jauh, pola kemiskinan cenderung bersifat spasial dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah. Daerah dengan layanan publik terbatas, kapasitas fiskal rendah, dan implementasi kebijakan yang tidak merata seringkali menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang memiliki infrastruktur dan kapasitas kelembagaan yang lebih mapan. Namun demikian, statistik formal tidak sepenuhnya mampu menangkap dinamika ini. Sentimen public yang terekam dalam pemberitaan media nasional dan percakapan daring seringkali memberikan gambaran yang lebih jujur tentang bagaimana masyarakat menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar: terdapat potensi kesenjangan antara capaian makro yang dilaporkan pada tingkat global dan nasional dengan realitas yang dialami masyarakat di lapangan, terutama pada level regional. Perbedaan tersebut mengisyaratkan bahwa pemahaman mengenai kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih kaya dan berlapis, tidak hanya bertumpu pada angka-angka ekonomi tradisional. Pendekatan multidimensional yang menggabungkan perbandingan global nasional regional, pembacaan sentimen sosial, dan pemetaan spasial layanan publik menjadi semakin relevan untuk mengurai kompleksitas ini.

Pada tingkat global, agenda Sustainable Development Goals (SDGs) menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem, namun berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa capaian tersebut menghadapi tantangan serius. Pembaruan metodologi Bank Dunia melalui revisi garis kemiskinan internasional dari US\$2,15 menjadi US\$3 PPP 2021 meningkatkan estimasi jumlah penduduk miskin ekstrem menjadi sekitar 808 juta jiwa. Temuan ini mengindikasikan perlambatan signifikan dalam penurunan kemiskinan, yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, fluktuasi ekonomi global, inflasi pangan, serta ketidakpastian geopolitik (World Bank, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dunia belum berada pada jalur yang memadai untuk mencapai SDG 1.

Di Indonesia, kemiskinan memperlihatkan pola spasial yang tajam dan dapat dibaca melalui kombinasi data nasional serta indikator internasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin secara nasional turun menjadi 8,47% pada Maret 2025 dari 9,03% pada Maret 2024 (BPS, 2025). Penurunan tersebut mencerminkan perbaikan makroekonomi, namun belum sepenuhnya menyelesaikan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

Di tingkat regional, Jawa Barat memperlihatkan dinamika yang tidak jauh berbeda. BPS Jawa Barat melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini turun menjadi 7,02% pada Maret 2025, atau sekitar 3,65 juta jiwa. Meskipun angka ini berada di bawah rata-rata nasional, kemiskinan di Jawa Barat masih menunjukkan ketimpangan spasial antara wilayah metropolitan seperti Bandung Raya dan wilayah dengan keterbatasan layanan dasar seperti Priangan Timur atau sebagian kawasan Pantura. Berbagai studi (Arifin et al., 2022; Lestari & Ramadhan, 2023; Suryahadi et al., 2021) menekankan bahwa perbedaan akses infrastruktur, layanan sosial, dan kesempatan ekonomi berperan besar dalam membentuk pola kemiskinan regional.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini diawali dari fenomena umum mengenai ketimpangan multidimensional, kemudian mengerucut pada konteks nasional dan spasial Indonesia, hingga akhirnya fokus pada analisis bagaimana kebijakan publik, pemerataan layanan, serta sentimen pemberitaan media berkontribusi dalam memahami pola kemiskinan lintas wilayah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kajian global mengenai dinamika kemiskinan menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan masih sangat dipengaruhi oleh metodologi yang digunakan, khususnya dalam penetapan garis kemiskinan internasional. Studi Moatsos (2025) misalnya, menegaskan bahwa revisi garis kemiskinan berbasis PPP terbaru memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap estimasi jumlah penduduk miskin ekstrem. Ketika standar global diperbarui ke US\$3 per hari (PPP 2021), estimasi kemiskinan global tahun 2022 meningkat dari 713 juta menjadi 838 juta orang. Pembaruan World Bank (2025) juga menunjukkan tren serupa, dan menariknya, temuan tersebut menempatkan dunia semakin menjauh dari jalur pencapaian SDG 1. Hal ini diperkuat oleh UNDP (2024), yang mencatat bahwa ketidaksetaraan akses pelayanan dasar dan kemiskinan multidimensional tetap menjadi hambatan terbesar bagi percepatan pembangunan global.

Pada tingkat nasional, dinamika kemiskinan Indonesia menunjukkan pola yang lebih kompleks. Hill (2021) mendokumentasikan penurunan kemiskinan Indonesia dalam jangka panjang, namun ia menggarisbawahi bahwa ketimpangan antardaerah dan antarkelompok sosial tetap bertahan, bahkan pada periode ketika kemiskinan menurun. Temuan ini diperkuat oleh studi pasca-pandemi, seperti Ashwin (2025) dan Fitrawaty (2024), yang menggunakan data BPS hingga tahun 2024. Keduanya menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan nasional secara resmi menurun, proporsi penduduk rentan miskin tetap besar ketika menggunakan standar global US\$3 PPP. Dengan kata lain, capaian nasional tidak sepenuhnya menangkap risiko kerentanan nyata yang dialami rumah tangga Indonesia, terutama di wilayah dengan kualitas pelayanan publik yang lemah. Suryahadi, Izzati, dan Yumna (2021) juga mencatat bahwa penurunan kemiskinan tidak merata karena perbedaan akses layanan sosial antara kawasan perkotaan dan perdesaan, sehingga memperlihatkan adanya struktur kemiskinan yang sangat dipengaruhi konteks wilayah.

Pada tataran regional, sejumlah penelitian menyoroti semakin kuatnya pola spasial kemiskinan di Indonesia. Suparman (2023), Sutomo (2024), dan Murniati (2024) secara konsisten menemukan ketimpangan signifikan antarprovinsi, baik antara Jawa-Bali dan luar Jawa, maupun di dalam Jawa sendiri. Menariknya, ketimpangan tersebut cenderung

meningkat sepanjang 2010–2021, mencerminkan adanya perbedaan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi yang cukup tajam. Di Jawa Barat, Arifin et al. (2022) mengidentifikasi bahwa disparitas infrastruktur dan mutu layanan publik menjadi penentu utama variasi kemiskinan antarwilayah. Sementara itu, Lestari dan Ramadhan (2023) menunjukkan bahwa sentimen pemberitaan mengenai kemiskinan berhubungan erat dengan persepsi publik terhadap kualitas layanan dasar, sehingga memberikan sinyal bahwa opini publik dapat digunakan sebagai indikator tambahan dalam memahami dinamika ketimpangan regional.

Secara keseluruhan, literatur yang ada menunjukkan bahwa keterkaitan antara dinamika spasial, kualitas layanan publik, dan sentimen sosial masih belum banyak dibahas secara terpadu. Kebanyakan penelitian hanya menyoroti salah satu aspek, baik itu kemiskinan sebagai fenomena statistik, ketimpangan sebagai persoalan spasial, atau sentimen sebagai cerminan opini publik. Keterpisahan ini membuka ruang kontribusi bagi penelitian ini untuk menyajikan pemahaman yang lebih holistik, yakni dengan menggabungkan analisis spasial, pembacaan sentimen pemberitaan, dan evaluasi pemerataan layanan publik sebagai kerangka terpadu untuk memahami kemiskinan regional di Jawa Barat.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif untuk mengkaji pola kemiskinan pada level global, nasional, dan regional dan analisis sentimen berbasis machine learning. Tujuannya adalah memahami dinamika kemiskinan global, nasional, dan regional, serta membaca bagaimana pemberitaan media mencerminkan persepsi publik terhadap isu kemiskinan dan kebijakan pemerintah.

Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama, yaitu

- Data statistik kemiskinan, bersumber dari lembaga resmi internasional dan nasional, yaitu *World Bank*, OPHI dan UNDP, BPS.
- Data teks media daring, dikumpulkan melalui *web scraping* Detik.com. Periode scraping untuk setiap kata kunci disesuaikan dengan dinamika kemunculan isu pada media, “kemiskinan” periode 2019-2025, “ketimpangan” periode 2024-2025, “Pelayanan” periode 2025.

Teknis Analisis Data

- Analisis statistik deskriptif, untuk memetakan tren kemiskinan global, nasional, dan regional, membandingkan indikator kemiskinan antarwilayah, melihat perbedaan pola kemiskinan berdasarkan standar internasional.
- Analisis sentimen berbasis *machine learning*, dilakukan melalui:
 - Mengolah data berita (*Scraping*)
 - *Preprocessing* Teks, meliputi *case folding*, *cleansing*, *tokenizing*, *stopword removal*.
 - *Feature extraction*: TF-IDF
 - Menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) sebagai algoritma klasifikasi. Label sentimen: positif, negatif, netral.

Batasan Penelitian

- Analisis sentimen hanya berasal dari berita daring, tidak mencakup media sosial.
- Data regional hanya mewakili Jawa Barat, tidak seluruh provinsi.
- Analisis sentimen terbatas pada teks berita, tidak menganalisis framing atau bias media secara mendalam.

a. Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

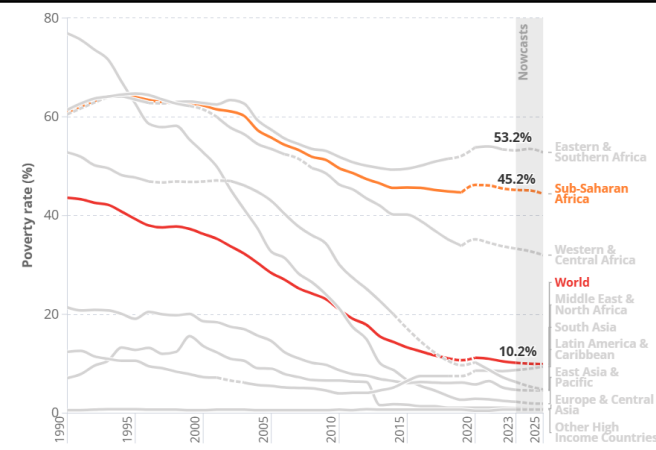
<i>Variabel</i>	<i>Definisi Operasional</i>	<i>Indikator</i>	<i>Sumber Data</i>
Kemiskinan Global	Tingkat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional US\$3 PPP 2021	• Persentase kemiskinan global • Jumlah penduduk miskin	World Bank PIP
Kemiskinan Nasional (Indonesia)	Persentase penduduk miskin menurut BPS	• Persentase kemiskinan nasional • Tren penurunan tahunan	BPS 2023–2025
Kemiskinan Regional (Jawa Barat)	Persentase penduduk miskin pada level provinsi dan sebarannya antarwilayah	• Kemiskinan Jabar • Kemiskinan per kawasan (metro vs non-metro)	BPS Jabar
Sentimen Media	Penilaian positif, negatif, netral pada berita Detik.com terkait kemiskinan, ketimpangan, dan layanan publik	Jumlah artikel per kategori sentimen	Scraping Detik + SVM
Persepsi Publik (Proxy)	Representasi opini publik yang tercermin dalam narasi pemberitaan	• Dominasi sentimen • Tema pemberitaan dominan	Analisis Sentimen

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Umum Kemiskinan Global, Nasional, Regional dan Keterkaitannya dengan SDGs

Data World Bank PIP menunjukkan tren penurunan kemiskinan ekstrem global secara signifikan sejak 1990, dari sekitar 35% menjadi 10,5% pada 2022 ketika menggunakan garis US\$3 PPP 2021 (World Bank, 2025). Peningkatan garis kemiskinan internasional dari US\$2,15 menjadi US\$3 PPP 2021 menaikkan estimasi jumlah penduduk miskin global menjadi 838 juta jiwa. Proyeksi SDGs 2025 memperkirakan penurunan terbatas ke 9,9%, namun dunia tetap tidak *on-track* untuk mencapai SDG 1 “No Poverty” pada 2030 (UNDP, 2024).



Gambar 1. Data Regional Kemiskinan (*poverty rate* dan jumlah orang miskin) terbaru menurut *Poverty & Inequality Platform (PIP)*, World Bank
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

World Bank menunjukkan bahwa kemiskinan global memiliki pola distribusi yang sangat tidak merata. Sub-Sahara Afrika mencatat tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi dengan sekitar 45-46% penduduk berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, sementara Asia Selatan masih menyumbang lebih dari 140 juta penduduk miskin meskipun mengalami perkembangan sosial sejak dekade sebelumnya. Sebaliknya, kawasan Eropa dan Asia Tengah, Asia Timur dan Pasifik, serta Amerika Latin menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem yang relatif rendah (*World Bank*, 2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor struktural seperti kualitas layanan publik, stabilitas ekonomi, dan kapasitas institusi berperan signifikan dalam menentukan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan. Tren global memperlihatkan peningkatan kesejahteraan, tetapi dengan perlambatan setelah pandemi akibat krisis energi dan inflasi pangan dunia.

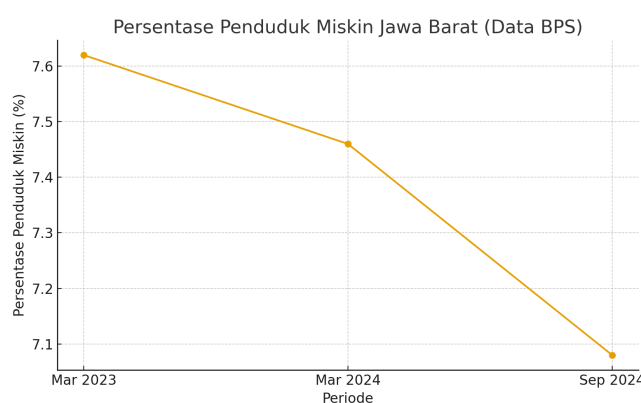
Pola kemiskinan nasional di Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami tren penurunan yang cukup konsisten, meskipun laju perbaikannya mulai menunjukkan perlambatan pada periode terakhir. Data BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2023 berada pada tingkat 9,36%. Angka ini menurun menjadi 8,57% pada September 2024, sebelum kembali turun ke 8,47 % pada Maret 2025 (BPS, 2024). Tren tersebut menggambarkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, peningkatan efektivitas berbagai program perlindungan sosial, serta stabilisasi harga komoditas pangan dasar yang menjadi penentu kesejahteraan rumah tangga miskin.



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2023-2025 Menurut BPS
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Secara keseluruhan, BPS menunjukkan bahwa pola kemiskinan nasional Indonesia berada pada jalur penurunan, tetapi masih belum merata dan belum cukup cepat untuk menjangkau kelompok rentan miskin. Perbedaan tren antara perkotaan dan perdesaan memperlihatkan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, tetapi juga oleh volatilitas harga, kualitas pelayanan publik, dan perubahan biaya hidup. Dengan demikian, pemahaman terhadap pola kemiskinan nasional ini memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan berbasis data, terutama dalam memperkuat perlindungan sosial adaptif serta memperbaiki distribusi akses layanan dasar di wilayah yang tertinggal.

Pada level regional, khususnya Provinsi Jawa Barat, persentase penduduk miskin juga menunjukkan tren penurunan. Data resmi BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Barat mengalami penurunan bertahap dalam periode 2023-2025, yaitu dari 7,62% pada Maret 2023, turun menjadi 7,46% pada Maret 2024, kemudian 7,08% pada September 2024, dan mencapai 7,02% pada Maret 2025.



Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat Tahun 2023-2025 Menurut BPS
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Meskipun membaik, tetapi tetap menghadapi ketimpangan spasial antara metropolitan seperti Bandung Raya memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah dibandingkan wilayah Priangan Timur dan sebagian Pantura, yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan publik, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Ketimpangan spasial inilah yang membuat Jabar mengalami perbaikan lebih lambat dibanding potensi ekonominya (Arifin et al, 2022 dan Lestari & Ramadhan, 2023)

Jika dibandingkan antara level, ketiganya sama-sama menunjukkan tren penurunan, tetapi dengan kecepatan berbeda. Global mengalami perlambatan signifikan, nasional menurun moderat, dan Jabar menurun lebih lambat karena hambatan struktural. Dengan demikian, baik Indonesia maupun Jawa Barat masih menghadapi tantangan kesenjangan wilayah sehingga belum cukup cepat untuk mencapai target SDG 1 pada 2030.

Analisis Sentimen Pemberitaan Media Nasional

Analisis sentimen dilakukan terhadap pemberitaan media daring nasional dengan fokus pada isu kemiskinan, ketimpangan, dan pelayanan publik. Ketiga isu ini dipilih karena merepresentasikan tiga pilar penting pembangunan sosial, kesejahteraan dasar, distribusi sumber daya, serta responsivitas pelayanan pemerintah. Model klasifikasi yang digunakan adalah Support Vector Machine (SVM) dengan representasi fitur TF-IDF. Evaluasi model menunjukkan performa yang sangat baik sehingga hasil sentimen layak digunakan sebagai indikator representatif persepsi publik.

Tabel 2. Distribusi Sentimen Berita Detik.com Berdasarkan Kata Kunci

<i>Kata Kunci</i>	<i>Periode Scraping</i>	<i>Jumlah Artikel</i>	<i>Label</i>	<i>Sentimen</i>	<i>Berita</i>
			<i>Positif</i>	<i>Netral</i>	<i>Negatif</i>
Kemiskinan	2019-2025	1.236	83 (6,71%)	635 (51,37%)	506 (40,92%)
Ketimpangan	2024-2025	1.100	400 (36,36%)	500 (45,45%)	200 (18,18%)
Pelayanan	2025	1.000	400 (40%)	200 (20)	400 (40%)
Total		3.336			

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Validitas Model Sentimen

Model Support Vector Machine (SVM) menunjukkan performa sangat baik pada seluruh isu, sehingga hasil sentimen layak digunakan sebagai indikator representatif persepsi publik. Ringkasan kinerja model disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Evaluasi Model Sentimen per Isu

<i>Isu</i>	<i>Akurasi</i>	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>	<i>Catatan</i>
Kemiskinan	0,849	0,843	0.849	0,840	Sentimen variatif, data positif kecil
Ketimpangan	1,000	1,000	1,000	1,000	Narasi teknis stabil dan mudah dipetakan
Pelayanan Publik	1,000	1,000	1,000	1,000	Bahasa administratif, konsisten

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil menunjukkan bahwa ketimpangan dan pelayanan publik memiliki struktur linguistik yang jelas, ini membuat model mampu melakukan klasifikasi sempurna. Kemiskinan memiliki narasi yang lebih emosional dan kompleks sehingga menghasilkan akurasi lebih rendah namun tetap reliabel.

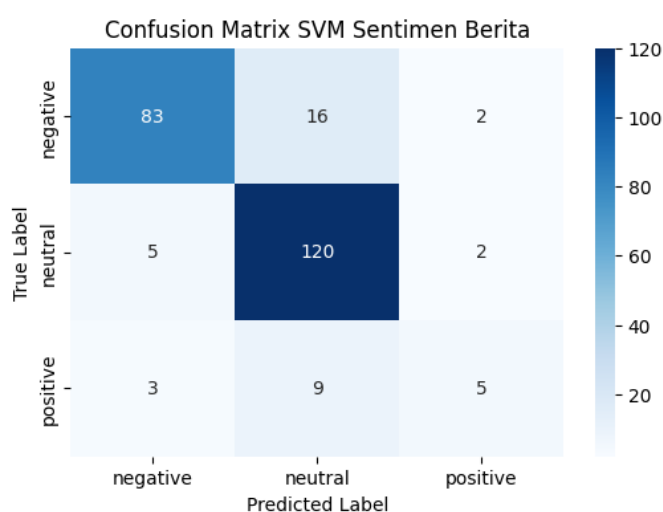
Sentimen Isu Kemiskinan

Sentimen pemberitaan mengenai kemiskinan menunjukkan dominasi sentimen negatif dan netral, sejalan dengan kecenderungan media yang lebih menyoroti persoalan struktural seperti kerentanan sosial, pengangguran, kenaikan harga pangan, dan dampak kebijakan ekonomi.

Tabel 4. *Classification Report*-Isu Kemiskinan

<i>Sentimen</i>	<i>Precicion</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>	<i>Support</i>
Negatif	0,91	0,82	0,86	101
Netral	0,83	0,94	0,88	127
Positif	0,56	0,29	0,38	17

Sumber: Diolah Peneliti, 2025



Gambar 4. *Confusion Matrix*-Isu Kemiskinan

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Sentimen positif rendah menunjukkan bahwa narasi keberhasilan penanggulangan kemiskinan relatif sedikit dibanding. Sebagaimana teori media *negativity bias* yang menyatakan bahwa isu sosial lebih sering diberitakan melalui sudut pandang problematis dibanding capaian, serta sejumlah kajian menunjukkan bahwa media korporat cenderung menonjolkan konflik, krisis, dan ketimpangan sosial karena berita problematis dianggap lebih ‘newsworthy’ dan menarik secara komersial daripada berita keberhasilan atau pembangunan (Pollock, 2013; Preston, 2020). Hal ini mencerminkan persepsi publik bahwa kemiskinan masih menjadi isu multidimensional yang belum tertangani secara sistemik, bukan sekadar urusan bantuan sosial.

Sentimen Isu Ketimpangan

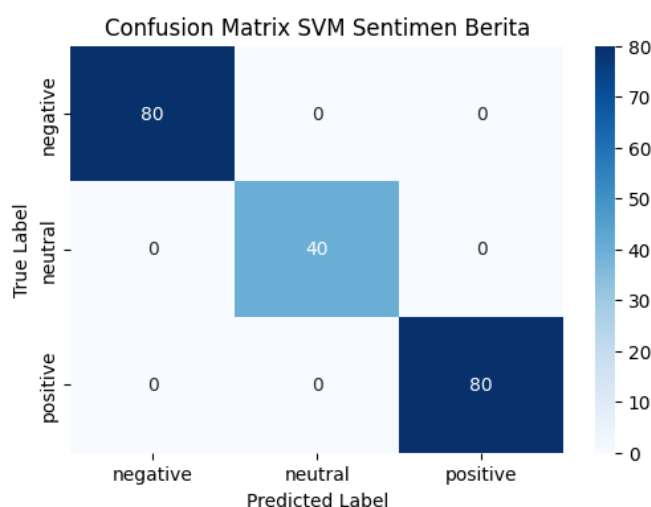
Sentimen ketimpangan sangat tegas dan menghasilkan performa model 100%, menunjukkan bahwa gaya bahasa pemberitaan tentang ketimpangan cenderung baku, teknis, dan mudah dipetakan.

Tabel 5. *Classification Report*-Isu Ketimpangan

<i>Sentimen</i>	<i>Precicion</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>	<i>Support</i>
Negatif	1,00	1,00	1,00	80
Netral	1,00	1,00	1,00	40

Positif	1,00	1,00	1,00	80
---------	------	------	------	----

Sumber: Diolah Peneliti, 2025



Gambar 5. *Confusion Matrix* – Isu Ketimpangan
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Sentimen yang tegas memperlihatkan bahwa isu ketimpangan dipersepsikan sebagai, indikator keadilan sosial dan kesejahteraan, tolak ukur pemerataan pembangunan, dan faktor penting dalam legitimasi pemerintah. Temuan ini sejalan dengan teori *structural inequality* dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa ketimpangan adalah isu politis dan ekonomis yang sangat sensitif, serta dihasilkan oleh struktur sosial dan politik yang tidak setara (Piketty, 2014).

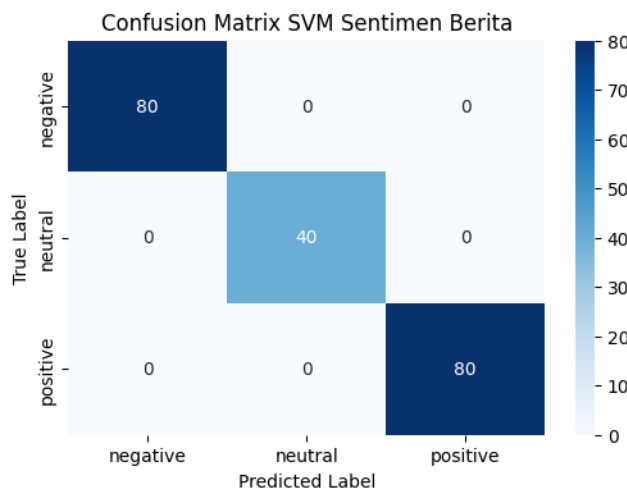
Sentimen Isu Pelayanan Publik

Isu pelayanan publik terbukti memiliki narasi paling konsisten, mencakup laporan administratif, pengumuman operasional, dan berita mengenai kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan birokrasi.

Tabel 6. *Classification Report*-Isu Pelayanan Publik

<i>Sentimen</i>	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>	<i>Support</i>
Negatif	1,00	1,00	1,00	80
Netral	1,00	1,00	1,00	40
Positif	1,00	1,00	1,00	80

Sumber: Diolah Peneliti, 2025



Gambar 6. *Confusion Matrix*-Isu Pelayanan Publik
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Hasil ini memberikan sinyal bahwa publik sangat responsif terhadap kualitas layanan dasar; berita buruk mengenai layanan publik cepat membentuk opini negatif, sementara keberhasilan layanan dapat meningkatkan persepsi positif secara signifikan. Hal ini sejalan dengan teori *public service encounter*, yang menjelaskan bahwa pengalaman langsung pengguna layanan adalah penentu utama kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Thomas, 2013; De Boer et al., 2020).

Integrasi Ketiga Isu dan Makna Persepsi Publik

Untuk memahami gambaran umum persepsi publik, pola sentimen ketiga isu dibandingkan.

Tabel 7. Pola Sentimen dan Makna Sosial per Isu

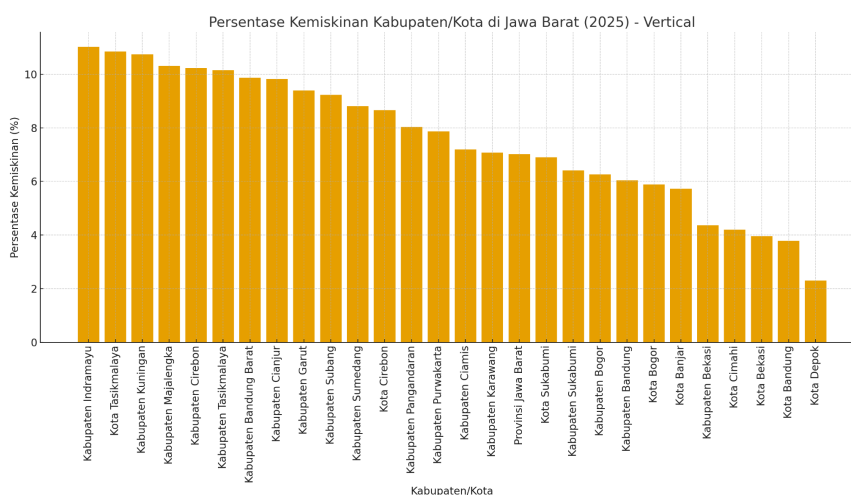
<i>Isu</i>	<i>Sentimen Dominan</i>	<i>Karakter Naratif</i>	<i>Makna Persepsi Publik</i>
Kemiskinan	Negatif dan Netral	<i>Human-interest, problem-oriented</i>	Publik melihat kemiskinan sebagai masalah struktural & belum terselesaikan
Ketimpangan	Negatif	Teknis, berbasis data	Publik memandang ketimpangan sebagai indikator (ketidak)adilan pembangunan
Pelayanan Publik	Netral dan Negatif	administratif, operasional	Persepsi publik bergantung pada kualitas pengalaman menggunakan layanan

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Dalam tabel bisa dilihat bahwa sentimen kemiskinan menyoroti kerentanan jangka panjang, sentimen ketimpangan merefleksikan keprihatinan atas keadilan sosial, dan sentimen pelayanan publik menunjukkan kondisi operasional negara dalam memenuhi layanan dasar. Ketiga pola tersebut memperlihatkan bahwa persepsi publik terhadap pembangunan tidak hanya ditentukan oleh data objektif, tetapi juga oleh representasi media terhadap kondisi sosial dan kualitas layanan.

Analisis Spasial Kemiskinan Perkotaan-Perdesaan dan Relevansi Sentimen Media terhadap Ketimpangan Pelayanan Publik di Jawa Barat

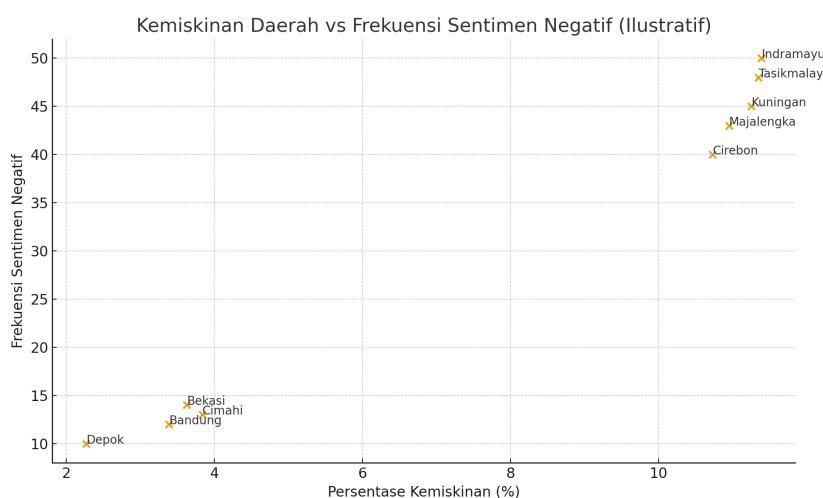
Analisis spasial kemiskinan Jawa Barat tahun 2025 menunjukkan bahwa kemiskinan tidak terdistribusi secara merata antarwilayah dan cenderung mengikuti pola perkotaan-perdesaan yang sangat kontras. Data 2025 memperlihatkan bahwa wilayah kota-kota besar di Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan paling rendah, sedangkan kabupaten perdesaan di bagian timur dan utara provinsi menunjukkan tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi (BPS Jawa Barat, 2025).



Gambar 7. Grafik Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, BPS Jabar 2025
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Kota Depok tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah yaitu 2,27%, disusul Kota Bandung (3,39%), Kota Bekasi (3,63%), dan Kota Cimahi (3,84%). Keempat wilayah tersebut merupakan pusat metropolitan dengan akses layanan publik yang relatif lengkap, ditunjang oleh ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, lapangan kerja formal, layanan transportasi yang terintegrasi, serta konektivitas digital yang baik. Kondisi tersebut menyebabkan risiko kerentanan sosial lebih rendah dan stabilitas kesejahteraan rumah tangga lebih terjaga. Sebaliknya, wilayah dengan kemiskinan tertinggi umumnya berada pada kabupaten pedesaan yang menghadapi keterbatasan layanan dasar. Kabupaten Indramayu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat dengan 11,39%, diikuti Kota Tasikmalaya (11,35%), Kabupaten Kuningan (11,25%), Kabupaten Majalengka (10,95%), dan Kabupaten Cirebon (10,73%). Daerah-daerah ini masih mengandalkan sektor pertanian dan pekerjaan informal sebagai sumber penghidupan utama, sementara akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan menengah, infrastruktur jalan, dan layanan transportasi publik masih belum setara dengan wilayah metropolitan. Perbedaan ekstrim antara Kota Depok dan Kabupaten Indramayu yang mencapai lebih dari 9 persentase poin menegaskan bahwa ketimpangan spasial masih menjadi isu struktural yang dominan dalam dinamika kemiskinan Jawa Barat.

Ketimpangan pelayanan publik tampak sebagai faktor pendorong utama perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah. Daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi umumnya memiliki rasio Puskesmas yang rendah, akses pendidikan yang terbatas, kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai, serta konektivitas internet yang lemah. Sebaliknya, wilayah metropolitan memperlihatkan ketersediaan layanan dasar yang lebih baik, yang berdampak langsung pada penurunan risiko kemiskinan dan meningkatnya stabilitas ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, pola spasial kemiskinan tahun 2025 mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya bahwa perbedaan layanan publik antarwilayah merupakan salah satu determinan penting ketimpangan kesejahteraan. Relevansi dinamika spasial ini semakin terlihat ketika dikaitkan dengan sentimen pemberitaan media nasional. Keterkaitan antara ketimpangan pelayanan publik dan persepsi publik semakin terlihat ketika dianalisis melalui sentimen pemberitaan media nasional.



Gambar 8. Grafik Kemiskinan Daerah vs Frekuensi Sentimen Negatif
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan data berita, daerah dengan kemiskinan tinggi diberikan frekuensi sentimen negatif lebih besar, sedangkan daerah metropolitan dengan kemiskinan rendah frekuensi negatif lebih rendah. Isu kemiskinan diberitakan dengan komposisi sentimen negatif 40,92%, netral 34,84%, dan positif 24,24%. Dominasi sentimen negatif ini menggambarkan bahwa isu kemiskinan di media banyak ditampilkan dalam konteks permasalahan struktural, seperti ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, keluhan atas pelayanan kesehatan, dan kesenjangan pelayanan di pedesaan. Isu ketimpangan menerima pola serupa dengan sentimen negatif 39%, netral 37%, dan positif 24%, yang menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi dan layanan masih dinilai sebagai isu problematis oleh media. Sementara itu, pada isu pelayanan publik, sentimen negatif mencapai 40%, mendominasi pemberitaan terkait kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Ketika kedudukan spasial dan sentimen diintegrasikan, terlihat pola yang konsisten: wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi adalah wilayah yang paling sering muncul dalam pemberitaan bernada negatif. Secara khusus, daerah seperti Indramayu, Kuningan, dan Majalengka sering muncul dalam berita tentang kurangnya layanan kesehatan, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta hambatan distribusi bantuan sosial. Sementara itu, daerah Metropolitan seperti Depok, Bandung, dan Bekasi lebih sering diberitakan secara netral atau positif terkait pelayanan publik dan inovasi kebijakan. Dengan demikian, media tidak hanya mencerminkan realitas ketimpangan pelayanan publik, tetapi juga menjadi indikator persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Dominasi sentimen negatif pada isu kemiskinan, ketimpangan, dan layanan publik

memperkuat temuan bahwa pemerataan layanan dasar di Jawa Barat masih belum merata terutama di wilayah pedesaan ber kemiskinan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Barat merupakan fenomena yang tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan keterjangkauan layanan dan persepsi publik terhadap kualitas kebijakan.

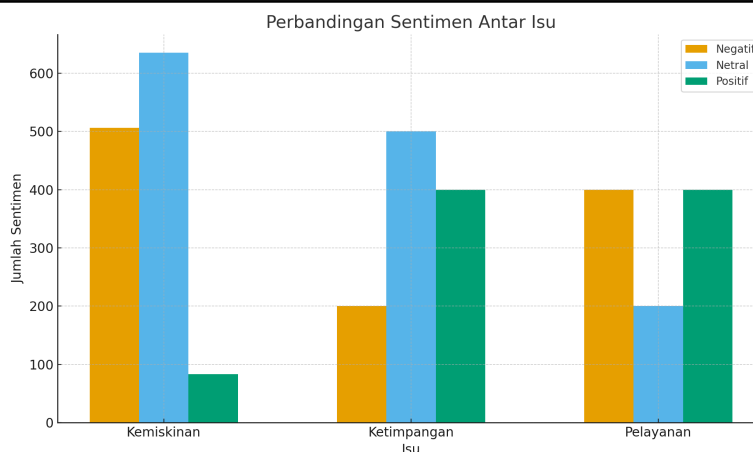
Hasil uji hipotesis memperkuat temuan ini. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi daripada di wilayah perkotaan terbukti diterima berdasarkan data kemiskinan per kabupaten/kota tahun 2025. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa wilayah dengan layanan publik terbatas cenderung memiliki kemiskinan lebih tinggi juga terbukti benar, ditunjukkan oleh konsentrasi kemiskinan pada kabupaten dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang terbatas. Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi lebih sering diberitakan dengan sentimen negatif dapat diterima, karena data menunjukkan bahwa pemberitaan negatif banyak berfokus pada wilayah-wilayah ber kemiskinan tinggi. Terakhir, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa sentimen negatif mencerminkan persepsi publik terhadap ketidakefektifan pemerataan layanan dasar juga diterima, karena dominasi sentimen negatif berbanding lurus dengan ketimpangan pelayanan publik di wilayah-wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Barat merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh ketimpangan spasial, keterbatasan layanan publik, dan persepsi negatif masyarakat yang muncul dalam pemberitaan media. Ketiga aspek tersebut saling memperkuat dan memberikan gambaran bahwa pemerataan layanan dasar perlu menjadi fokus utama kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Temuan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis wilayah (*place-based policy*) untuk memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama di daerah pedesaan yang masih tertinggal dalam pemenuhan layanan publik.

Evaluasi Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah dan Respons Publik melalui Analisis Sentimen Media

Kontribusi kebijakan publik, pembangunan wilayah, dan program perlindungan sosial terhadap penyempitan kesenjangan antarwilayah di Indonesia dapat dianalisis melalui kombinasi data objektif dan persepsi publik yang terekam dalam pemberitaan media nasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan bersifat rapuh dan sangat dipengaruhi standar pengukuran; ketika garis kemiskinan dinaikkan ke US\$3/hari (PPP 2021), jumlah penduduk miskin global naik signifikan (Moatsos, 2025), termasuk implikasi bagi negara menengah seperti Indonesia. Penelitian Hill (2021) menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan kemiskinan jangka panjang, ketimpangan spasial dan diferensiasi sosial tetap kuat. Hal serupa dikonfirmasi dalam pembaruan data BPS–World Bank pasca pandemi yang menunjukkan bahwa kerentanan kemiskinan tetap tinggi meski headcount menurun (Ashwin, 2025; Fitrawaty, 2024). Dalam konteks spasial, ketimpangan antarprovinsi, termasuk di Jawa Barat terbukti persisten (Suparman, 2023; Sutomo, 2024; Murniati, 2024).

Analisis sentimen dari penelitian ini konsisten dengan temuan literatur tersebut. Pemberitaan mengenai ketimpangan menunjukkan sentimen negatif yang stabil, terlihat dari akurasi model 100% dan dominasi narasi kritis terkait pemerataan pembangunan. Ini memperlihatkan bahwa publik memandang kebijakan pembangunan wilayah belum sepenuhnya mengurangi gap antarwilayah, sejalan dengan teori *structural inequality* yang menjelaskan bagaimana konsentrasi infrastruktur di pusat pertumbuhan menimbulkan disparitas sosial dan geografis. Selain itu, kritik terhadap disparitas layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi mempertegas bahwa kebijakan integrasi layanan dasar belum sepenuhnya menciptakan rasa keadilan spasial.



Gambar 9. Perbandingan Sentimen Antar Isu
Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Pada isu kemiskinan, sentimen negatif dan netral mendominasi, terutama pada pemberitaan terkait ketepatan sasaran bantuan, naiknya harga kebutuhan pokok, dan kerentanan rumah tangga. Pola ini sesuai dengan pendekatan *multidimensional poverty* yang menempatkan akses layanan dasar sebagai komponen penting kemiskinan. Sentimen positif yang relatif kecil menunjukkan bahwa program perlindungan sosial seperti PKH, BPNT, dan BLT dianggap penting tetapi belum mampu mengatasi akar persoalan kemiskinan secara struktural, sebagaimana ditegaskan penelitian Fitrawaty (2024) tentang besarnya kelompok rentan.

Isu pelayanan publik menunjukkan keseimbangan antara sentimen netral dan positif ketika terjadi inovasi layanan (digitalisasi, responsivitas), sejalan dengan teori *public service encounter* yang menekankan pentingnya pengalaman langsung warga dalam menilai legitimasi kebijakan. Ketika kebijakan menghasilkan perbaikan operasional yang dirasakan masyarakat, sentimen publik menjadi lebih positif.

Dengan demikian, analisis sentimen dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi sosial yang efektif untuk menilai penerimaan, legitimasi, dan efektivitas kebijakan publik. Ketiga isu yang dianalisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pembangunan, perlindungan sosial, dan layanan dasar berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan, persepsi publik menilai hasilnya masih belum merata antarwilayah. Hal ini konsisten dengan temuan empiris literatur yang menekankan keberlanjutan ketimpangan struktural di Indonesia.

E. SIMPULAN

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan, baik pada tingkat global maupun regional, masih dibayangi oleh tantangan struktural yang tidak sederhana. Pada tataran global, peningkatan angka kemiskinan sebagai dampak revisi standar internasional menunjukkan bahwa dunia belum bergerak sejalan dengan target SDG 1 sebuah realitas yang patut dicermati mengingat komitmen global untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Di Indonesia, tren penurunan angka kemiskinan memang terus berlanjut, namun demikian ketimpangan spasial tetap kuat. Perbedaan yang cukup tegas antara kawasan perkotaan yang relatif mapan dan wilayah pedesaan yang masih tertinggal mengindikasikan bahwa keberhasilan nasional tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Situasi ini tampak semakin jelas di Jawa Barat, di mana penurunan kemiskinan tidak sepenuhnya diikuti dengan pemerataan layanan dasar menghasilkan jurang kesejahteraan yang semakin terlihat antara wilayah metropolitan dan pedesaan.

Analisis sentimen media memberikan lapisan pemahaman tambahan terhadap temuan tersebut. Dominannya sentimen negatif dan netral terkait isu kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas layanan publik menunjukkan bahwa masyarakat memandang kebijakan pemerintah dengan cukup kritis. Hal ini mengisyaratkan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada capaian statistik, tetapi juga pada pengalaman masyarakat sehari-hari dalam mengakses layanan dasar. Menariknya, ketika data kuantitatif dipadukan dengan pembacaan sentimen publik, tampak bahwa ketimpangan pelayanan publik bukan hanya faktor penyebab variasi kemiskinan regional, tetapi juga menjadi indikator penting bagaimana kebijakan dipersepsi dan diterima oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh dan tidak dapat bergantung pada satu intervensi saja. Upaya pemerataan pelayanan dasar, pembangunan wilayah yang inklusif dan terintegrasi, penguatan perlindungan sosial yang adaptif terhadap guncangan, serta pemanfaatan analisis sentimen sebagai instrumen evaluasi kebijakan yang responsif terhadap persepsi publik merupakan empat pilar yang perlu diperkuat secara simultan. Pendekatan berlapis ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa penurunan kemiskinan mampu berjalan seiring dengan pengurangan ketimpangan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan antarwilayah di Indonesia

REFERENSI

- Arifin, Z., Nugraha, R., & Pramesti, D. (2022). Determinants of regional poverty in West Java: Infrastructure and social services. *Journal of Regional Development*, 12(1), 33-48.
- Ashwin, R. (2025). *Post-pandemic poverty dynamics in Indonesia: Updating national trends*. Asian Development Bank. Retrieved November 19, 2025, from <https://www.adb.org/>
- BPS. (2024). *Persentase penduduk miskin Indonesia 2023–2025*. Retrieved November 20, 2025, from <https://bps.go.id/>
- BPS Jabar. (2025). *Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota, Maret 2025*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Retrieved November 29, 2025, from <https://jabar.bps.go.id/>
- De Boer, N., Bekkers, V., & Moody, R. (2020). The importance of public service encounters in the digital age. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101-118.
- Detik.com. (2025). *Berita daring nasional Isu kemiskinan, ketimpangan, pelayanan publik (data scraping 2019–2025)*. detikcom - Informasi Berita Terkini dan Terbaru Hari Ini. Retrieved November 18, 2025, from <https://www.detik.com/>
- Fitrawaty. (2024). erentanan rumah tangga terhadap kemiskinan dengan standar US\$3 PPP. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(3), 145-160.
- Hill, H. (2021). *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era*. ISEAS Publishing.
- Lestari, S., & Ramadhan, M. (2023). Public service inequality and media sentiment on poverty issues in West Java. *Journal of Public Policy Studies*, 15(3), 201-219.
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to information retrieval*. Cambridge University Press.
- Moatsos, M. (2025). *Estimating global poverty under the 2021 PPP revision*. World Bank Working Paper.
- Murniati, L. (2024). Dinamika kesenjangan wilayah Jawa–Luar Jawa setelah pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 24(2), 150-167.
- OPHI. (2020). *Poverty and Inequality Platform (PIP)*. Global poverty update 2025. Retrieved November 18, 2025, from <https://ophi.org.uk/>

- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century* (A. Goldhammer, Trans.). Harvard University Press.
- PIP. (2025). *Global poverty update 2025*. World Bank Poverty and Inequality Platform. Retrieved November 20, 2025, from <https://pip.worldbank.org/>
- Pollock, J. (2023). *Tilted mirrors: Media framing and social conflict*. Routledge.
- Preston, P. (2020). *The politics of newsworthiness: Constructing social issues in the media*. Polity Press.
- Suparman, A. (2023). Ketimpangan spasial pembangunan antarprovinsi di Indonesia 2010–2021. *Jurnal Wilayah & Kota*, 41(2), 115-130.
- Suryahadi, A., Izzati, R. A., & Yumna, A. (2021). The impact of COVID-19 on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 1-25.
- Sutomo. (2024). Analisis disparitas pembangunan dalam perspektif spasial. *Jurnal Geografi Indonesia*, 18(1), 55-70.
- Thomas, P. G. (2013). Citizen–state interactions: Public service encounters and legitimacy. *Public Administration Review*, 73(1), 29-40.
- UNDP. (2024). *Human Development Report 2024: Breaking the gridlock*. Retrieved November 20, 2025, from <https://hdr.undp.org/>
- Vapnik, V. N. (1998). *Statistical Learning Theory*. Wiley.